

CATRA

MAJALAH DPN



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

EDISI XL TAHUN 2025



INFO KITA:

Menhan Sjafrie Olahraga Bersama Keluarga Besar Kemhan di Monas

DPN Perkuat Sinergi Pertahanan dan Ekonomi Nasional melalui Kunjungan Strategis

PEMBENTUKAN DEWAN PERTAHANAN NASIONAL



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Majalah Dewan Pertahanan Nasional Majalah Catra Edisi XL Tahun 2025 hadir menyapa para pembaca. Kehadiran majalah ini bukan sekadar sebagai media informasi, melainkan juga sebagai ruang edukasi, refleksi, dan inspirasi mengenai isu-isu pertahanan, keamanan, serta kebijakan strategis bangsa.

Edisi kali ini mengangkat tema besar tentang peran Dewan Pertahanan Nasional dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan negara, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis global maupun regional yang kian kompleks. Pembaca akan disuguhkan berbagai artikel tajuk utama, opini, liputan kegiatan, hingga rubrik "Tahukah Anda" yang menyajikan informasi ringan namun tetap sarat makna.

Melalui majalah ini, kami berharap tercipta pemahaman yang lebih luas di kalangan masyarakat, akademisi, maupun praktisi tentang pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga pertahanan nasional. DPN hadir sebagai simpul koordinasi, wadah kolaborasi, dan sekaligus think tank strategis bagi Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya majalah ini, khususnya para penulis, kontributor, dan pembaca setia. Semoga sajian kami dapat memberi manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat semangat kebangsaan.

Salam
Redaksi Majalah Dewan Pertahanan Nasional

hormat,

TAJUK UTAMA :

- Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.....4

INFO KITA :

- DPN adakan Admin Game Tanggap Darurat Menghadapi Megathrust dan Tsunami.....8
- Menhan Sjafrie Olahraga Bersama Keluarga Besar Kemhan di Monas.....10
- Kolaborasi Lintas Lembaga Hadirkan Solusi TMC di Lampung.....12
- Sinergi DPN dan PT Agrinas: Kolaborasi Menuju Energi Terbarukan dan Ketahanan Pangan.....13
- DPN Perkuat Sinergi Pertahanan dan Ekonomi Nasional melalui Kunjungan Strategis.....14
- DDPN Tampil Gemilang, Akhiri Turnamen Futsal HUT RI ke-80 di Peringkat 4.....19

OPINI :

- Ekonomi Keberlanjutan untuk Pertahanan Negara.....16
- *Agentic AI*: Masa Depan Kecerdasan Buatan yang Bertindak Mandiri dan Potensinya untuk Pertahanan Nasional.....20

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- Revisi UU TNI Resmi Disahkan.....22
- PPN Naik Jadi 12% di 2025, Kebutuhan Fiskal atau Beban Rakyat?.....24

TAHUKAH ANDA :

- QRIS: Bikin Transaksi Praktis, Bikin Rupiah Lebih Kuat?.....26
- Delapan Asta Cita Presiden RI.....27
- Ancaman di Bawah Laut: Mengungkap Bahaya Megathrust.....28

Istilah Sosmed Gen Z (dengan Bahasa Inggris)

1. *Flex*
Pamer sesuatu (barang, prestasi, gaya hidup). “Dia suka flex barang branded.”
2. *Glow up*
Perubahan penampilan menjadi jauh lebih baik/positif.
“Setelah kuliah, dia glow up banget.”
3. *Ghosting*
Menghilang tiba-tiba tanpa penjelasan, biasanya dalam hubungan.
“Dia ghosting aku setelah 3 kali ketemu.”
4. *Gaslighting*
Memanipulasi orang lain agar meragukan realitas atau perasaan mereka.
“Dia gaslighting biar aku merasa salah.”
5. *Lowkey*
Diam-diam/tidak ingin terlalu menonjolkan.
“Aku lowkey suka sama dia.”
6. *Slay*
Melakukan sesuatu dengan sangat baik atau tampil luar biasa.
“Outfit kamu slay banget!”
7. *Stan*
Superfan/fans berat.
“Aku stan Blackpink dari 2019.”
8. *Cancel culture*
Gerakan memboikot tokoh/brand karena dianggap bermasalah.
“Artis itu kena cancel gara-gara skandal.”
9. *FOMO (Fear of Missing Out)*
Takut ketinggalan tren, acara, atau gosip.
“Ikut aja, biar nggak FOMO.”
10. *Main character*
Menganggap diri sendiri seperti tokoh utama dalam hidup/cerita.
“Hari ini vibes aku main character banget.”
11. *Boujee (fancy, bourgeois)*
Gaya mewah, hidup glamor.
“Dia boujee banget nongkrongnya selalu di café mahal.”



Pertahanan negara merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dinamika geopolitik, ancaman multidimensional, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor telah mendorong adanya penyesuaian kelembagaan strategis di tingkat nasional. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional hadir sebagai tonggak baru yang menandai peralihan kelembagaan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menuju Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memiliki dasar yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan diperkuat dengan Peraturan Presiden. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Neg-

ara menyebutkan bahwa pertahanan negara merupakan upaya universal yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional. Untuk menjamin ketepatan tersebut, diperlukan lembaga koordinator yang bersifat strategis - itulah peran DPN. Dengan legalitas undang-undang, DPN menjadi instrumen resmi negara, bukan sekadar *forum ad hoc*. Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan kebutuhan adaptif Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan masa depan.

DPN dibentuk untuk memastikan adanya arah kebijakan dan strategi pertahanan yang menyeluruh, jangka panjang, serta selaras dengan kepentingan nasional. Lembaga ini berfungsi sebagai "think tank" sekaligus badan pengarah bagi Presiden dalam merumuskan



PEMBENTUKAN DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom

strategi, dan kebijakan pertahanan. Kehadiran DPN mencegah fragmentasi antar kementerian/lembaga, karena semua keputusan strategis pertahanan diharmonisasikan melalui satu pintu.

Ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk militer, tetapi juga non-militer seperti siber, ekonomi, energi, pangan, hingga diplomasi internasional. Karena itu, pertahanan nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor. DPN berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan TNI, Polri, kementerian, lembaga pemerintah, bahkan unsur masyarakat sipil dan akademisi dalam memberikan masukan. Dengan koordinasi ini, kebijakan pertahanan menjadi lebih integratif dan responsif terhadap dinamika ancaman global maupun domestik.

Salah satu masalah klasik dalam pertah-

anan adalah ketidakkonsistenan arah kebijakan ketika terjadi pergantian pemerintahan. Dengan adanya DPN yang berbasis pada undang-undang, kesinambungan strategi pertahanan dapat terjaga. DPN memastikan bahwa rencana jangka panjang, seperti modernisasi alutsista, pembangunan industri pertahanan, dan sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA), tidak terputus akibat dinamika politik lima tahunan.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pertahanan negara, Presiden membutuhkan lembaga penasihat yang kredibel, independen, dan komprehensif. DPN mengisi ruang itu dengan memberikan analisis strategis berbasis data, kajian akademik, dan skenario ancaman. Dengan begitu, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, terukur, dan berori-

TAJUK UTAMA

entasi jangka panjang.

Secara politis dan psikologis, keberadaan DPN memperkuat citra bahwa Indonesia serius membangun pertahanan nasional yang kuat, modern, dan adaptif. Ini sekaligus menjadi pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia memiliki tata kelola pertahanan yang jelas, berbasis hukum, dan berorientasi kepentingan nasional.

Pembentukan DPN berdasarkan undang-undang adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar administratif. DPN memastikan adanya koordinasi lintas sektor, kesinambungan kebijakan, serta penasihat strategis bagi Presiden dalam menghadapi ancaman multidimensi. Dengan legalitas hukum yang jelas, DPN menjadi garda terdepan dalam merumuskan, mengawal, dan memperkuat strategi pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia.

Dasar Hukum dan Fungsi

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, DPN berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

Tugas DPN meliputi:

- Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan

terpadu pertahanan negara.

- Menyusun kebijakan pengerahan komponen pertahanan dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
- Menelaah serta menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 mempertegas peran DPN dalam memberi pertimbangan, perumusan solusi kebijakan, serta fungsi strategis di bidang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Fungsi operasional DPN mencakup:

1. Perumusan kebijakan terpadu pertahanan negara.
2. Penyusunan kebijakan mobilisasi dan demobilisasi.
3. Penilaian risiko kebijakan pertahanan.
4. Perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
5. Pelaksanaan administrasi.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPN terdiri atas:

- Ketua DPN: Presiden RI.
- Anggota tetap: Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI.



TAJUK UTAMA

- Unsur tambahan anggota tetap: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan.
- Anggota tidak tetap: pimpinan instansi pemerintah maupun nonpemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi.

Sejarah Perjalanan Kelembagaan

Perjalanan lembaga ini mengalami berbagai transformasi:

- 1946: Pembentukan Dewan Pertahanan Negara (UU No. 6/1946).
- 1954: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (PP No. 17/1954).
- 1961: Lahir Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) (Keppres No. 618/1961).
- 1970: Wanhankamnas (Keppres No. 51/1970).
- 1999: Wantannas (Keppres No. 101/1999).
- 2024: Peralihan menjadi Dewan Pertahanan Nasional (Perpres No. 202/2024).

Peralihan Wantannas ke DPN

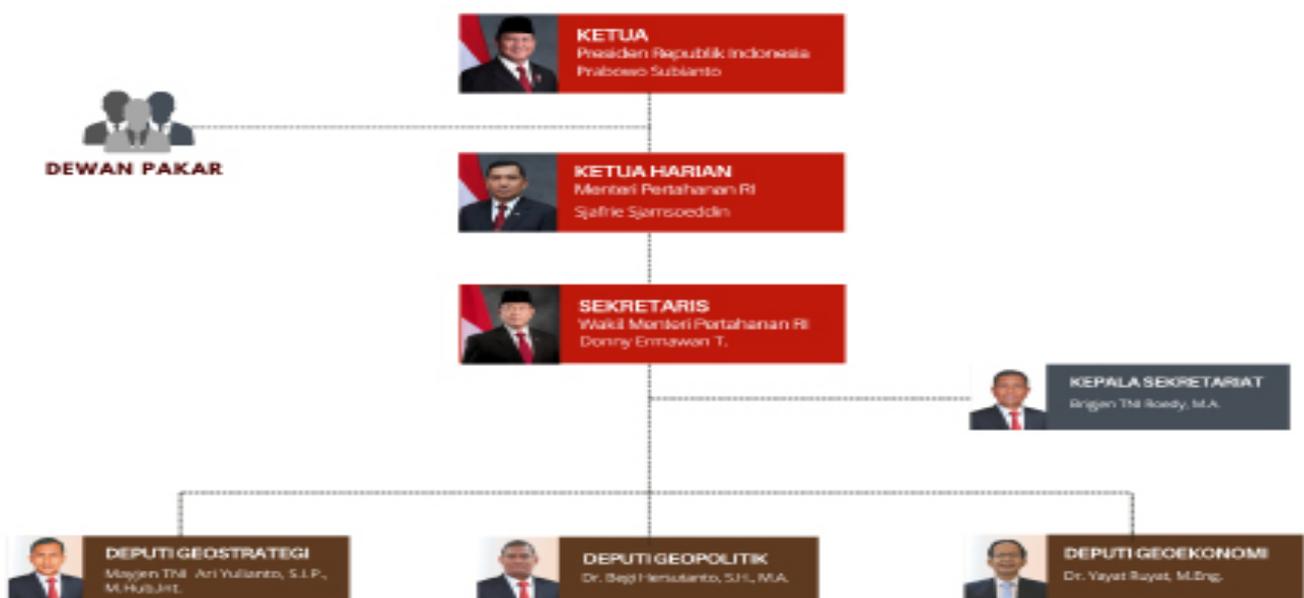
Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Sekretaris DPN. Sidang pertama DPN dipimpin oleh Presiden Prabowo Sub-

ianto pada 7 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, menandai pertama kalinya DPN berfungsi setelah pembentukannya di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Selanjutnya, pada 20 Februari 2025, dilantik Deputi DPN, di antaranya Brigjen TNI Ari Yulianto (Geostrategi), Dr. Begi Hersutanto (Geopolitik), dan Dr. Yayat Ruyat (Geoekonomi). Kemudian, pada tanggal 10 April 2025, dilakukan pengalihan Sekretariat Wantannas ke Kementerian Pertahanan sebagai langkah resmi transisi kelembagaan.

Peralihan Wantannas menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Perpres Nomor 202 Tahun 2024 mencerminkan evolusi kelembagaan pertahanan Indonesia dari masa ke masa. Dari DPN (1946), Wankamnas (1954), Wanhankamnas (1970), Wantannas (1999) hingga kembali menjadi DPN (2024), perjalanan ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis global. Ke depan, Dewan Pertahanan Nasional diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi strategis yang solid, menjaga kedaulatan, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks.

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL





DPN adakan *Admin Game* Tanggap Darurat Menghadapi Megathrust dan Tsunami

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan “Admin Game Tanggap Darurat Menghadapi Gempa Bumi Megathrust dan Tsunami” yang bertempat di Gedung Wisma Elang Laut (WEL), Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional melalui simulasi skenario darurat yang realistis, melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait.

Acara dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan selaku Sekretaris DPN, Marsekal Madya TNI (Purn.) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P. Simulasi itu mereplikasi situasi gempa megathrust berkekuatan M9,0 di Selat Sunda (kedalaman 10 km; koordinat 6,94° LS – 104,70° BT). Guncangan – dengan intensitas VII–VIII MMI – diberi waktu sekitar 60 detik dan

dirasakan hingga wilayah DKI Jakarta.

BMKG turut berperan penting dengan menyampaikan bahwa informasi potensi gempa megathrust bukan merupakan prediksi, melainkan data potensi yang harus dipahami secara cermat. Masyarakat diminta tetap tenang, dan BMKG menjamin pemantauan intensif serta penyampaian informasi gempa maupun peringatan dini tsunami secara tepat waktu.

Menanggapi skenario bencana, sistem peringatan dini BMKG memberikan hitung mundur 40–45 detik sebelum guncangan mencapai Jakarta dan memprakirakan potensi tsunami dengan status AWAS, SIAGA, dan WASPADA di pesisir Jawa, Sumatera, Bali, serta Bangka Belitung. Untuk wilayah pesisir Jakarta Utara, estimasi waktu kedatangan gelombang tercatat sekitar 3 jam 20 menit pasca gempa.

INFO KITA



sekadar simulasi, melainkan sarana penguatan strategi nasional. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, menguji prosedur peringatan dini BMKG, dan menghasilkan solusi kebijakan berbasis situasi riil, latihan ini menjadi tonggak penting dalam memperkokoh ketahanan bangsa menghadapi ancaman bencana besar.

Sekretaris DPN Donny Ermawan didampingi Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Sekretaris Utama BNPB, Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., Deputy Bid. Operasi Pencarian & Pertolongan Dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayjen TNI Mar Edy Prakoso. S.E, M.M., M.Tr. Opsla., Waasops Panglima TNI, Marsekal Pertama TNI M. Taufiq Arasj, S.Sos., M.I.POL., CHRMP., Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr., Ir., Muhammad Wafid A. N., M.SC., serta para Deputy DPN dan Kepala Sekretariat DPN.

Kehadiran perwakilan dari BNPB, PVM-BG, BPBD DKI Jakarta, Kementerian ESDM, TNI, hingga Polri menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang nyata. Tujuan latihan ini meliputi:

- Uji efektivitas sistem peringatan dini BMKG
- Latihan respons cepat pemerintah dan masyarakat.
- Mitigasi gangguan komunikasi, listrik, transportasi.
- Penguatan koordinasi lintas kelembagaan untuk penyelamatan dan pengurangan risiko bencana.

Sekretaris DPN menegaskan bahwa simulasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret dimulai dari identifikasi tugas, kendala, hingga solusi strategi yang akan diusulkan kepada Presiden melalui Ketua Harian yaitu Menhan RI.

Kegiatan Admin Game Tanggap Darurat Menghadapi Megathrust dan Tsunami ini bukan





Menhan Sjafrie Olahraga Bersama Keluarga Besar Kemhan di Monas

Oleh : Enang Suhendar, S.Kom

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyelenggarakan kegiatan “Olahraga Bersama” yang berlangsung meriah di Lapangan Silang Monas, Jakarta, dimulai pukul 07.00 WIB, Jakarta, Jumat (22/8).

Acara dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, yang dihadiri lebih dari 1.500 pegawai dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemhan, serta jajaran pimpinan eselon I dan II dan anggota Dewan Pertahanan Nasional RI.

Kegiatan diawali dengan senam bersama penuh semangat yang menggambarkan kebersamaan seluruh peserta. Tak hanya itu, acara juga diramaikan oleh bazar UMKM, panggung hiburan, dan pembagian door prize termasuk lebih dari 70 hadiah seperti TV, kulkas, dispenser, sepeda, dan hadiah utama berupa dua unit sepeda motor yang disponsori oleh Bank BRI, BNI, dan Mandiri.

Dalam puncaknya, Menteri Pertahanan secara simbolis menyerahkan kunci sepeda motor kepada para pemenang dan menciptakan suasana hangat lewat salam, sapa, dan sesi foto bersama dengan para pegawai

Dalam arahnya, Menhan Sjafrie menyampaikan pesan penting yang menjadi inti dari kegiatan ini: soliditas, disiplin, dan kehormatan.

Ia menekankan bahwa seluruh jajaran Kemhan harus bekerja sebagai satu komando, tanpa adanya kerja sendiri-sendiri. “Kekompakan lahir batin adalah mutlak buat kita,” tegasnya. Disiplin dipandang sebagai fondasi pelaksanaan tugas yang efektif dan tata kelola yang baik. Kehormatan, baik secara individu maupun kelembagaan, harus dijaga sebagai nilai luhur yang menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lain

Selain itu, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Kemhan adalah “otaknya” kedaulatan negara, sementara TNI adalah “ototnya” keduanya harus bersinergi menjaga ekosistem bangsa secara terpadu. Ia juga menyampaikan bahwa masa periode 2025–2029 akan penuh tantangan yang menuntut birokrasi Kemhan bergerak lebih dinamis, efektif, disiplin, efisien, dan transparan menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan.

Kegiatan olahraga bersama di Monas bukan sekadar ajang rekreasi, melainkan momentum memperkuat rasa kebersamaan, meneguhkan etos kerja, dan menanamkan nilai akuntabilitas serta profesionalisme di lingkungan Kemhan,” ujar Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin. Ia pun mengimbau seluruh jajaran kemhan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan menjadi panutan bagi institusi lainnya dalam koridor tata kelola yang baik.

DPN dan Kemenag Bahas Moderasi Beragama dan Strategi Pertahanan Nasional

Oleh : Enang Suhendar, S.Kom

Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., memimpin kunjungan kerja ke Kementerian Agama hari ini. Rombongan disambut langsung oleh Menteri Agama, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., di kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (21/9).

Dalam kesempatan tersebut, Donny Ermawan menyampaikan bahwa DPN dibentuk melalui Perpres Nomor 202 Tahun 2024. DPN memiliki tugas strategis untuk memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan pertahanan nasional—terutama terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Diskusi hangat kemudian mengangkat tema moderasi beragama, suatu semangat penting di tengah keberagaman Indonesia dengan enam agama resmi serta berbagai aliran kepercayaan. Menteri Agama menegaskan

peran strategis Kemenag dalam membimbing kehidupan keagamaan, mengelola zakat dan wakaf, membina keluarga sakinah, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama. Fokus utama Kemenag saat ini adalah penguatan moderasi beragama dengan tujuan menjaga kerukunan, mencegah ekstremisme dan radikalisme, serta membentuk masyarakat yang bijak, toleran, dan saling menghargai.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Garuda Merah Putih II dari TNI atas keberhasilan mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara. Hal ini mencerminkan solidaritas berkelanjutan Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Deputi Geostrategi, Deputi Geoekonomi, Kepala Sekretariat, Tenaga Ahli Muda DPN, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Agama.





Kolaborasi Lintas Lembaga Hadirkan Solusi TMC di Lampung

Oleh : Raharjo

Dewan Pertahanan Nasional (DPN), bekerja sama dengan BMKG, BNPB, BRIN, PT Pindad, TNI Angkatan Udara, dan PT Smart Aviation, menggelar demonstrasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lanud Pangeran Mohammad Bun Yamin untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pada Selasa (26/8).

Teknologi yang diuji menggunakan flare CoSAT 1000 buatan PT Pindad, dipasang pada pesawat Cessna Caravan 208B yang kemudian diterbangkan untuk menghasilkan hujan buatan melalui peningkatan cloud condensation nuclei (CCN), tanpa dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan.

Kelebihan sistem ini antara lain adalah pengoperasian yang praktis, cepat, dan efisien sekaligus menjadi langkah strategis menuju kemandirian teknologi dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Acara tersebut turut ditinjau oleh Wakil Menteri Pertahanan selaku Sekretaris DPN, Donny Ermawan; Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy 12

Dermawan; dan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal M. Tonny Harjono, serta dihadiri pejabat tinggi lintas lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Donny Ermawan menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan dan pengembangan TMC berbasis flare secara luas, khususnya melalui riset kolaboratif antara BRIN dan PT Pindad agar produksi dalam negeri dapat ditingkatkan.





Sinergi DPN dan PT Agrinas: Kolaborasi Menuju Energi Terbarukan dan Ketahanan Pangan

Oleh : Yenny Sundari, S.P.

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan *courtesy call* ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di kantor pusat yang berada di Jakarta Timur, pada Senin (4/8).

Rombongan DPN dipimpin oleh Deputy Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto, S.I.P., M.H.I. dan Deputy Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., didampingi oleh jajaran pakar utama hingga muda. Pihak Agrinas menyambut langsung oleh Komisariss Utama, Letjen TNI (Purn.) R. Wisnoe Prasetja Boedi, bersama Direktur Utama, Letjen TNI (Purn.) Agus Sutomo, didampingi jajaran manajemen lainnya.

Dalam pertemuan ini, DPN memperkenalkan diri sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia. Sementara Agrinas Palma Nusantara menjelaskan bahwa mereka

adalah transformasi dari PT Indra Karya (Perseero), bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit dan konsultasi konstruksi, dengan fokus pengelolaan lahan serta pengembangan komoditas strategis.

Agrinas memiliki mandat strategis dalam mendukung Amanat Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Selain itu, BUMN ini juga ditugaskan sebagai penyedia utama minyak goreng, serta penjamin ketersediaan pasokan daging sapi dan kambing di tingkat nasional.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjajaki potensi kerja sama dalam rangka memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional. Kedua pihak sepakat membuka peluang kolaborasi strategis berkelanjutan ke depan.



DPN Perkuat Sinergi Pertahanan dan Ekonomi Nasional melalui Kunjungan Strategis

Oleh : Nadia T. Putri, S.IP.

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan solusi kebijakan strategis pertahanan nasional, mencerminkan peran sentralnya dalam me-nyatukan sektor industri dan ekonomi untuk membangun ketahanan nasional yang mandiri.

DPN melalui Deputy Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, dan jajarannya melaksanakan serangkaian kunjungan kerja dan diskusi strategis guna memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi ekonomi dan kemandirian pertahanan nasional.

1. Optimalisasi Sinergi Industri Pertahanan

Pada tanggal 29 Juli, DPN mengunjungi PT Pindad di Bandung untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan alutsista. Kunjungan ini bertujuan menghimpun data dan masukan kebijakan terkait penguatan industri dalam negeri. DPN menyampaikan mandat pentingnya

dalam penyusunan kebijakan pertahanan strategis, sementara PT Pindad menegaskan langkah percepatan transformasi, inovasi, dan peningkatan kapasitas produksi alutsista.

2. Mendukung Integrasi Teknologi Pertahanan

Melanjutkan kunjungan, pada 31 Juli, DPN bertemu dengan jajaran PT Len Industri. Perusahaan ini berperan sebagai integrator teknologi pertahanan mengembangkan sistem C4ISR, radar, sistem combat management untuk kapal perang, radio militer, dan lainnya. DPN menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis Len dalam memperkuat interoperabilitas alutsista dan mendorong kemandirian teknologi pertahanan nasional.

3. Kolaborasi Ekonomi melalui KEK

Memasuki bulan Agustus, DPN mengintensifkan dialog antar-institusi. Pada 1 Agustus, dilakukan audiensi ke Dewan Nasional KEK di

INFO KITA



free trade zone (FTZ) di Kari-mun guna percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi wilayah.

Melalui rangkaian ini, DPN konsisten memperkuat keterhubungan antara strategi pertahanan dan pertumbuhan ekonomi, mendorong kemandirian industri, teknologi, dan dukungan ekonomi wilayah sebagai pilar Indonesia yang le-bih tangguh dan berkembang. DPN tidak hanya memperkuat kemandirian pertahanan, tetapi juga memperluas wawasan bahwa pertahanan dan ekonomi nasional adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, keduanya bersinergi untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Jakarta. DPN mengenalkan peran strategisnya sebagai pembuat kebijakan pertahanan, sekaligus menegaskan potensi kolaborasi dengan Dewan KEK yang mencatat pencapaian investasi Rp 90,1 triliun, penyerapan tenaga kerja 47.747 orang, dan ekspor Rp 22,02 triliun.

Pada 12 Agustus, DPN meninjau kawasan KEK di Batam, mendalami potensi serta perkembangan infrastruktur perbatasan dan aset industri strategis guna menopang pertahanan dan stabilitas ekonomi di wilayah.

Pada 13 Agustus, DPN menggelar diskusi dengan tema “Peran KEK dan Industri Batam serta Karimun dalam Pertumbuhan Ekonomi Kepri”, dengan pelaku usaha dan industri dari KEK Batam dan Karimun. Diskusi menyoroti kontribusi signifikan KEK terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri, inovasi fasilitasi investasi, serta aspirasi memperluas kawasan





Gambar : Ilustrasi dari ChatGPT

Ekonomi Keberlanjutan untuk Pertahanan Negara

Oleh : Darnis, S.E., M.Han.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Ekonomi Keberlanjutan

Kekuatan nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga pada ketangguhan ekonomi dalam menghadapi dinamika global. Dalam era kontemporer, geoekonomi menjadi dimensi strategis yang mempengaruhi stabilitas dan kedaulatan negara. Geoekonomi memadukan unsur ekonomi dan geopolitik, di mana kekuatan ekonomi digunakan sebagai instrumen pengaruh, tekanan, atau bahkan dominasi terhadap negara lain. Geoekonomi menempatkan kekuatan ekonomi sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan politik, baik dalam skala nasional maupun internasional (Priyono dan Yusgiantoro 2017). Pendekatan ini melihat bahwa persaingan an-

ternegara tidak hanya berlangsung dalam ranah militer atau politik, tetapi juga melalui penguasaan sumber daya ekonomi, perdagangan, teknologi, dan jaringan keuangan global.

Dalam konteks penguasaan sumber daya ekonomi, Indonesia telah memiliki landasan konstitusional pada Pasal 33 UUD 1945, yang memberikan mandat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, di tengah situasi geoekonomi global yang semakin kompetitif, mandat ini menghadapi tantangan berat seperti halnya persaingan sumber daya alam, perang dagang, dan transformasi ekonomi hijau, untuk menghadapi tantangan yang ada pemerintah mengambil kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi keberlanjutan agar memastikan bahwa

pengelolaan sumber daya alam kita dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan dapat dirasakan oleh generasi-generasi Indonesia yang akan datang.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa asta cita sebagai prioritas pembangunan nasional. Pada asta cita 2, secara eksplisit dinyatakan bahwa ekonomi hijau menjadi salah satu pilar dalam memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, maka sudah seharusnya prinsip-prinsip ekonomi hijau atau ekonomi keberlanjutan diterapkan dalam kegiatan bisnis dan industri yang ada di Indonesia baik yang dikelola oleh publik maupun privat.

Environmental, Social , Governance (ESG) sebagai Indikator Ekonomi Keberlanjutan

Konsep *Environmental, Social, Governance* (ESG) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan suatu organisasi atau perusahaan dari tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Akar pemikiran ESG dapat ditelusuri sejak berkembangnya gagasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dekade 1960 sampai dengan 1980-an. Saat itu, fokus utama masih pada tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (*charity*) atau program sosial di luar strategi inti bisnis. Namun, CSR dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan keberlanjutan yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan strategi perusahaan dan kinerja finansial.

Istilah ESG mulai dikenal secara global pada tahun 2004 melalui laporan "Who Cares Wins" yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan tersebut menekankan bahwa faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi, karena memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja jangka panjang dan mitigasi risiko. Selanjutnya, pada tahun 2006, lahirlah UN Principles for Responsible Investment (PRI) yang mendorong para investor global untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam strategi investasi mereka.

Penerapan ESG semakin mendapat-

kan perhatian setelah tahun 2015, ketika *Paris Agreement dan Sustainable Development Goals* (SDGs) disepakati oleh komunitas internasional. Kedua inisiatif global ini mengukuhkan pentingnya ESG sebagai tolok ukur utama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di Indonesia, perkembangan ESG mulai signifikan dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Faktor pendorong utamanya adalah tren global, tuntutan investor, dan kebijakan nasional yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Pada aspek lingkungan (*environmental*), Indonesia menghadapi tantangan besar seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah. Pemerintah telah merespon dengan komitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, merapikan perdagangan karbon (*carbon trading*), serta mempercepat transisi energi terbarukan melalui rencana umum energi nasional (RUEN) dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) hijau. Di sektor swasta, perusahaan tambang, energi, dan perkebunan mulai mengadopsi standar lingkungan yang lebih ketat, seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri sawit.

Pada aspek sosial (*social*), tantangan yang dihadapi meliputi ketimpangan ekonomi, rendahnya inklusi keuangan di beberapa wilayah, dan perlindungan pekerja di sektor informal. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan percepatan inklusi keuangan digital melalui QRIS dan layanan perbankan digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Corporate Social Responsibility oleh BUMN dan perusahaan swasta juga semakin diarahkan untuk selaras dengan SDGs, sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran dalam memberdayakan komunitas lokal.

Sedangkan pada aspek tata kelola (*governance*), Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi masalah korupsi dan birokrasi yang kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Bursa Efek Indonesia juga mendorong pencatatan indeks saham berbasis ESG seperti ESG Leaders dan SRI-KEHATI Index sebagai insentif bagi peru-

OPINI

sahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan dengan baik.

Prinsip *Enviromental, Social , Governance* (ESG) memperkuat Sistem Pertahanan Negara

Penerapan prinsip-prinsip ESG dalam pengelolaan dunia usaha dapat memberikan gambaran sejauh mana pasal 33 UUD 1945 diterapkan. Penerapan pasal 33 UUD 1945 melalui prinsip-prinsip ESG dapat berimplikasi terhadap pertahanan negara, khususnya pertahanan dari ancaman nir militer antara lain, korupsi aset strategis, ketersediaan sumber daya alam jangka panjang, dan stabilitas sosial ekonomi di masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ESG, hal ini berkaitan erat dengan pilar Governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya. Penguasaan negara yang disertai tata kelola yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, khususnya pada aset strategis seperti tambang, energi, dan infra- struktur vital. Jika aset strategis ini bebas dari praktik korupsi, maka kekuatan ekonomi dan logistik nasional menjadi lebih stabil. Stabilitas ini merupakan bagian penting dari pertahanan negara, karena aset strategis yang aman berarti negara memiliki cadangan energi, bahan baku, dan infrastruktur yang siap digunakan saat menghadapi situasi krisis atau konflik.

Pilar Environmental berperan menjaga keberlanjutan pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui konservasi, efisiensi penggunaan, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini penting untuk pertahanan negara karena menjamin ketersediaan sumber daya jangka panjang. SDA yang terkelola secara lestari membuat negara tidak bergantung secara berlebihan pada impor bahan vital (seperti pangan, air, dan energi), sehingga kerentanan terhadap blokade ekonomi atau embargo dapat diminimalkan.

Konsep usaha bersama berasaskan kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan nilai solidaritas sosial dan pemerataan kesempatan ekonomi. Dalam perspektif ESG, pilar sosial menekankan inklusi sosial, perlindungan hak pekerja, keadilan ekonomi, dan keterlibatan masyarakat. Implementasi social inclusion memperkuat kohesi sosial karena seluruh lapisan masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat dari pembangunan. Kohesi sosial yang kuat akan mengurangi potensi konflik internal, polarisasi politik, dan kerusuhan sosial yang dapat mengganggu stabilitas negara. Stabilitas ini adalah modal penting bagi pertahanan nasional, karena ancaman eksternal akan sulit masuk jika masyarakat bersatu dan memiliki rasa percaya pada negara.

Pada dasarnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip-prinsip ESG diharapkan mampu meningkatkan sistem pertahanan dan kemandirian agar terwujudnya Indonesia Emas 2045.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN





DPN Tampil Gemilang, Akhiri Turnamen Futsal HUT RI ke-80 di Peringkat 4

Oleh : Guspahri Ardiansyah Hasibuan, S.Kom.

Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Kemenko Polkam RI menggelar turnamen futsal seru yang berlangsung pada 4–7 Agustus 2025. Sebanyak 14 tim dari berbagai instansi ikut ambil bagian, termasuk tim kebanggaan kita, Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Di laga perdana, DPN langsung berhadapan dengan Kopolnas. Pertandingan berlangsung ketat, namun sayang DPN harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 3–4. Tak patah semangat, di laga kedua melawan Deputi 5 Polkam, DPN berhasil menahan imbang 1–1.

Laga ketiga berjalan mulus. Lawan dari Biro MKOK tidak hadir, sehingga kemenangan otomatis diraih DPN. Semangat semakin membara di laga keempat saat DPN mengalahkan

Biro Umum dengan skor meyakinkan 5–1, sekaligus memastikan tiket ke babak semi final.

Di semi final, DPN kembali bertemu dengan Deputi 5. Pertandingan berakhir imbang dan harus ditentukan lewat adu penalti. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak dan DPN harus mengakui keunggulan lawan.

Peluang juara ketiga pun masih terbuka saat DPN kembali bertemu Kopolnas. Laga berakhir imbang lagi, namun sekali lagi drama adu penalti membuat DPN harus puas berada di peringkat ke-4 turnamen.

Meski belum berhasil membawa pulang piala, perjuangan tim DPN patut diacungi jempol. Permainan solid, semangat pantang menyerah, dan kekompakan tim membuat kita semua bangga. Tahun depan, siapa tahu giliran tim DPN yang angkat trofi!



Gambar : Ilustrasi dari ChatGPT

Agentic AI Masa Depan Kecerdasan Buatan yang Bertindak Mandiri dan Potensinya untuk Pertahanan Nasional

Oleh : Guspahri Ardiansyah Hasibuan, S.Kom.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin pesat, dan kita kini memasuki era baru: *Agentic AI* — AI yang tidak hanya merespons perintah, tetapi mampu bertindak secara mandiri untuk menyelesaikan suatu tujuan.

Bagi banyak sektor, termasuk pertahanan, ini adalah terobosan besar yang dapat membantu pengambilan keputusan strategis, efisiensi operasional, dan keamanan nasional.

Apa itu *Agentic AI*?

Agentic AI adalah AI yang memiliki kemampuan untuk: Merencanakan strategi, Mengambil keputusan dan Menjalankan serangkaian tugas tanpa intervensi manusia di setiap langkah.

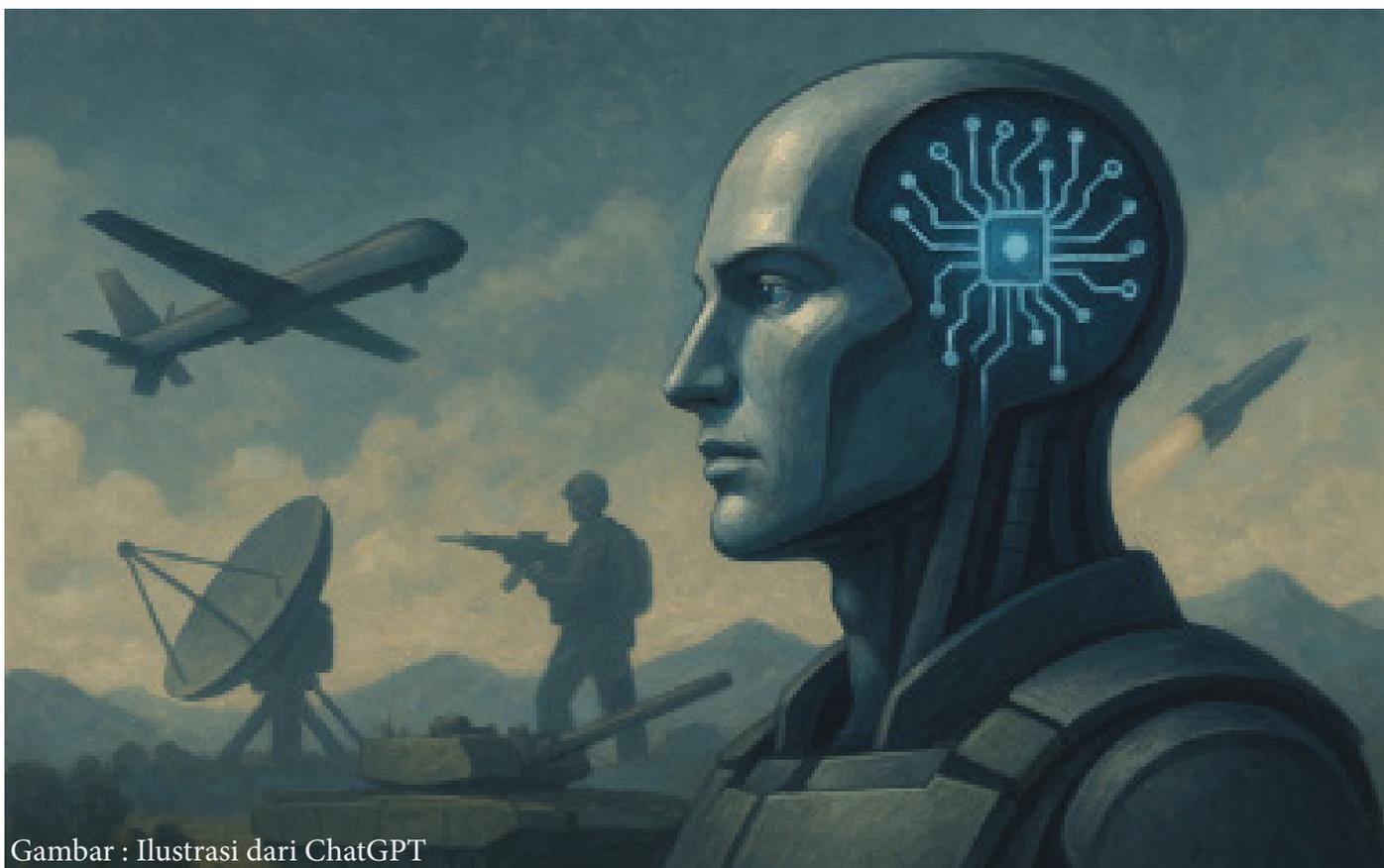
Jika AI generatif biasa hanya menjawab per-

tanyaan atau menghasilkan konten, *Agentic AI* mampu memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah detail, mengakses sumber data, melakukan analisis, hingga mengeksekusi rencana secara *end-to-end*.

Agentic AI menggabungkan *Large Language Models* (LLM) untuk memahami konteks dan bahasa manusia dan Algoritma perencanaan untuk menentukan tahapan kerja. Integrasi dengan sistem eksternal (database, sensor, API). Umpan balik otomatis untuk memperbaiki hasil secara real-time.

Relevansi dengan Tugas Dewan Pertahanan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional (DPN)



Gambar : Ilustrasi dari ChatGPT

memiliki fungsi strategis: memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan umum di bidang pertahanan. Dalam konteks ini, *Agentic AI* dapat menjadi alat pendukung yang sangat berharga.

Potensi Penerapan Agentic AI di DPN

1. Analisis Intelijen dan Ancaman *Agentic AI* dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber laporan lapangan, berita internasional, data satelit, hingga media sosial kemudian menganalisisnya untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Perencanaan Strategis Pertahanan AI ini dapat menyusun skenario pertahanan berdasarkan data terkini, memprediksi perkembangan konflik, dan merekomendasikan opsi kebijakan yang efisien serta minim risiko.
3. Koordinasi Antar Instansi DPN sering berperan dalam koordinasi dengan kementerian/lembaga lain. *Agentic AI* dapat membantu mengelola aliran informasi, membuat ringkasan rapat lintas instansi, hingga memantau progres implementasi kebijakan.
4. Simulasi Kebijakan Sebelum kebijakan diambil, *Agentic AI* dapat melakukan simulasi dampak (baik jangka pendek maupun panjang) terhadap kondisi keamanan dan stabilitas nasional.

5. Manajemen Krisis

Dalam keadaan darurat, *Agentic AI* mampu membantu merumuskan langkah cepat berdasarkan data *real-time* misalnya dalam penanganan bencana atau insiden keamanan siber.

Tantangan Penggunaan di Sektor Pertahanan

- Keamanan Data: Informasi strategis negara harus terlindungi dari kebocoran.
- Kendali Manusia: Meskipun AI bisa bertindak mandiri, keputusan akhir tetap harus di tangan pejabat berwenang.
- Etika dan Regulasi: Perlu aturan ketat agar AI tidak disalahgunakan.

Agentic AI memiliki potensi besar untuk membantu DPN menjalankan tugasnya, mulai dari analisis situasi, perumusan kebijakan, hingga koordinasi strategis. Jika dimanfaatkan dengan tepat, teknologi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pertahanan nasional di era digital.

Di masa depan, *Agentic AI* bisa menjadi “asisten strategis” DPN bekerja cepat, akurat, dan adaptif, sementara kendali penuh tetap berada di tangan manusia yang memahami nilai dan tujuan pertahanan bangsa.



Gambar : Ilustrasi dari ChatGPT

Revisi UU TNI Resmi Disahkan

Oleh : Fauziah Nurunnajmi, S.E

Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia lahir dari kebutuhan negara untuk menyesuaikan peran dan kedudukan TNI dengan perkembangan lingkungan strategis, dinamika ancaman, serta tata kelola pertahanan modern. Setelah dua dekade berjalan, regulasi lama dianggap belum cukup menjawab tantangan baru, khususnya dalam hal ancaman siber, penugasan lintas kelembagaan, dan manajemen sumber daya manusia TNI.

Selain itu, batas usia pensiun yang ditetapkan pada tahun 2004 tidak lagi sejalan dengan kondisi demografi, tingkat harapan hidup, dan pola pengelolaan karier di institusi lain seperti Polri dan ASN. Perubahan juga didorong oleh kebutuhan memperjelas rantai komando dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer agar tidak terjadi tumpang tindih antara Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan Kementerian Pertahanan sebagai perumus kebijakan pertahanan.

Revisi ini juga menjawab kritik lama men-

genai kejelasan jabatan sipil tertentu yang boleh diisi prajurit TNI aktif. Dengan UU baru, daftar lembaga diperluas dan dipertegas, sembari tetap menjaga prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer.

UU No. 3 Tahun 2025 mengubah beberapa pasal penting, terutama terkait kedudukan TNI, tugas operasi selain perang (OMSP), penugasan prajurit di jabatan sipil, dan batas usia pensiun.

1. Kedudukan TNI (Pasal 3)

- TNI ditegaskan berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.
- Untuk perumusan kebijakan, strategi, dan dukungan administrasi, TNI ditempatkan dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

2. Tugas TNI (Pasal 7)

- Jumlah tugas OMSP meningkat dari 14 menjadi 16.
- Penambahan meliputi:
 - a) Membantu penanggulangan ancaman pertahanan siber.

ma:

1. Kejelasan rantai komando: Penegasan posisi Presiden dan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi dualisme dalam pengambilan keputusan.
2. Ekspansi tugas OMSP: Dengan memasukkan pertahanan siber dan perlindungan WNI di luar negeri, UU ini menempatkan TNI dalam spektrum ancaman modern yang bersifat non-tradisional.
3. Perluasan jabatan sipil tertentu: Penambahan lembaga yang dapat diisi TNI aktif memperkuat fungsi pertahanan lintas sektoral, meski di sisi lain memunculkan perdebatan terkait supremasi sipil.
4. Reformasi manajemen SDM: Kenaikan batas usia pensiun mencerminkan adaptasi terhadap demografi dan kebutuhan mempertahankan keahlian strategis lebih lama, namun juga berimplikasi pada dinamika regenerasi dan promosi jabatan di internal TNI.

Meski telah disahkan, UU ini menuai reaksi kritis dari mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sejumlah aksi mahasiswa, termasuk di Universitas Indonesia pada 20 Maret 2025, menyatakan akan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Organisasi seperti Amnesty International Indonesia, KontraS, dan YLBHI menilai perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif berpotensi mengembalikan dwifungsi dan melemahkan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi. Kritik juga diarahkan pada proses legislasi yang dianggap berjalan cepat, minim keterbukaan, dan tanpa partisipasi bermakna.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyoroti tidak adanya publikasi resmi draf sebelum pembahasan, yang mengurangi kualitas masukan publik. Namun, Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa prosedur telah dijalankan sesuai aturan dan kebutuhan pertahanan negara menjadi landasan utama perubahan ini.

Perbedaan pandangan atas UU No. 3 Tahun 2025 menandai pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pertahanan nasional dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menjadi arena untuk menguji baik aspek formil maupun materiil dari UU ini, sekaligus menentukan arah konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

Poin-poin penting revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan diharapkan selesai sebelum masa reses DPR mulai Jumat (21/3). Berikut poin-poin penting perubahan yang dibahas.



Penempatan di kementerian/ lembaga (Pasal 47)

Menjadi 15 kementerian/ lembaga, terdapat 5 tambahan jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut dan Kejaksaaan Agung.



Batas usia pensiun (Pasal 43)

Usia pensiun bagi bintang dan tamtama 53 tahun menjadi 55 tahun.
Usia pensiun bagi perwira 58 tahun diubah menjadi 58-62 tahun, sesuai pangkat (khusus bintang 4 sesuai kebijakan presiden).



Kedudukan TNI (Pasal 3)

Kedudukan TNI dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Perjalanan revisi UU TNI

Data TNI, 13 Maret 2025

2010
Mulai dibahas di TNI dan Kemenhan.

2015
Masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

2020
Masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024.

2024
Penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademik.

2025
Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan), 11 Maret 2025



Tujuan revisi



Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter.



Meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi prajurit TNI.



Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karir dan usia pensiun.

Perubahan UU TNI yang diajukan DPR diperlukan sebagai landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil."



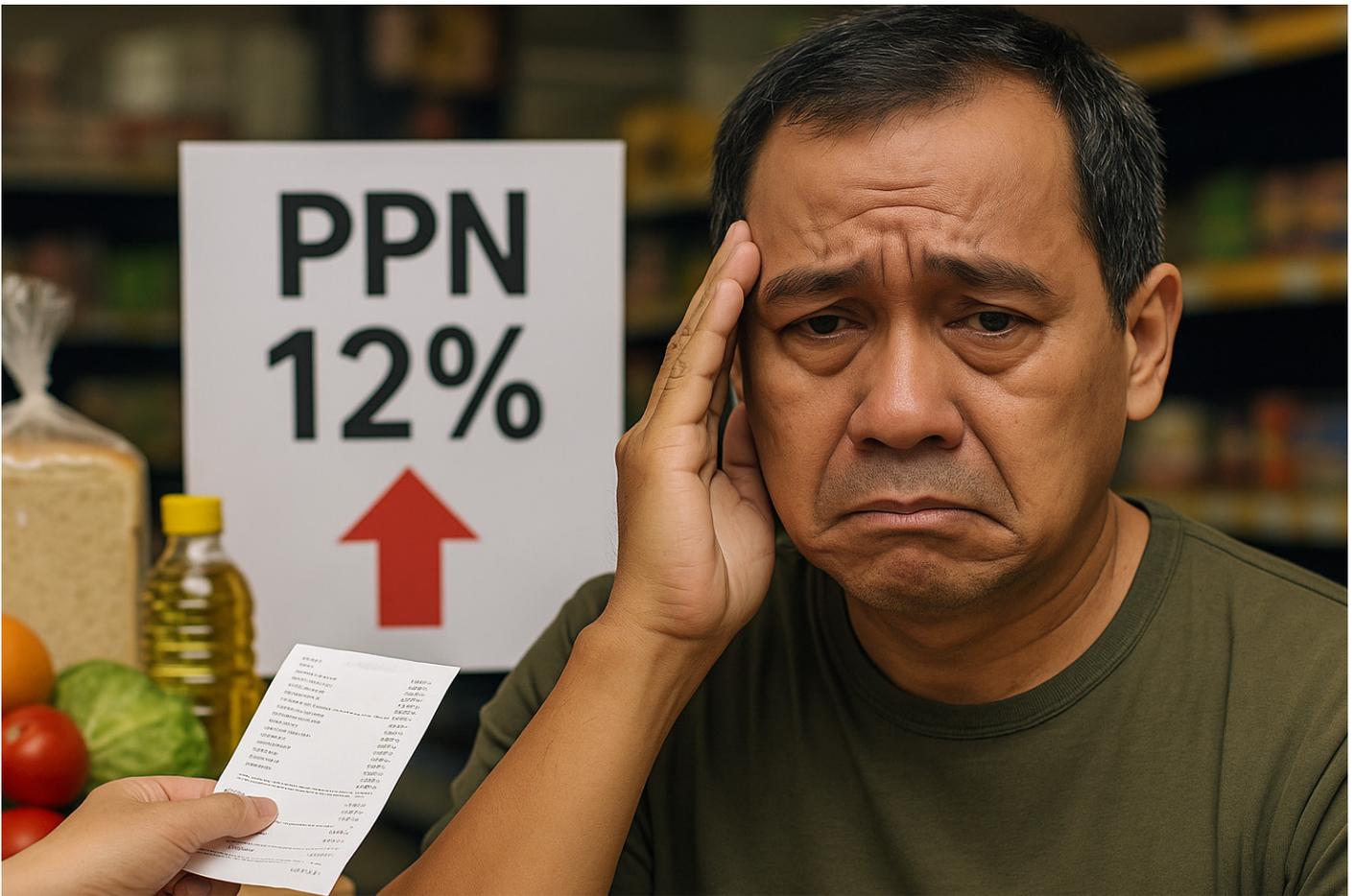
Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Pertahanan

b) Melindungi WNI dan kepentingan nasional di luar negeri.

3. Penugasan pada Jabatan Sipil (Pasal 47)
 - Daftar lembaga yang bisa diisi prajurit aktif diperluas menjadi 16 K/L termasuk Kemhan, Setneg, Lemhannas, BNN, BNPT, Bakamla, BNPB, BNPP, Kejaksaan (Jampidmil), dan Mahkamah Agung.
 - Di luar lembaga tersebut, prajurit yang akan menduduki jabatan sipil wajib pensiun atau mundur dari dinas aktif.
4. Batas Usia Pensiun (Pasal 53)
 - Bintang dan Tamtama: 55 tahun.
 - Perwira (hingga Kolonel): 58 tahun.
 - Pati Bintang 1–3: 60–62 tahun.
 - Pati Bintang 4: 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan dua kali melalui Keputusan Presiden.
 - Jabatan fungsional tertentu dapat sampai 65 tahun.
 - Disertai aturan transisi untuk prajurit yang mendekati masa pensiun saat UU berlaku.

Perubahan Pokok

Secara garis besar, ada empat perubahan ut-



PPN Naik Jadi 12% di 2025, Kebutuhan Fiskal atau Beban Rakyat?

Oleh : Fauziah Nurunnajmi, S.E

Mulai tahun 2025, pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah dirancang sejak 2021. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa kenaikan ini penting untuk memperkuat penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan menjaga keberlanjutan fiskal. Namun, di sisi lain, masyarakat khawatir kenaikan PPN akan memperberat beban hidup di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

PPN adalah pajak konsumsi yang bersifat regresif, artinya berlaku sama bagi semua kalangan tanpa membedakan tingkat pendapatan.

Setiap orang yang membeli barang atau jasa kena pajak akan membayar tambahan sesuai tarif yang berlaku. Dengan naiknya PPN menjadi 12%, otomatis harga barang dan jasa juga akan menyesuaikan, meski besarnya bervariasi tergantung rantai distribusi dan daya tawar pasar.

Pemerintah beralasan bahwa peningkatan PPN ini akan meningkatkan penerimaan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Dana tersebut nantinya diharapkan bisa menopang pembangunan infrastruktur, membiayai program sosial, serta memperbaiki defisit anggaran pasca pandemi.

Dampak Ekonomi dan Sosial

KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Dampak terhadap Konsumen Kenaikan tarif PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Kelompok ini paling rentan karena sebagian besar penghasilan mereka habis untuk konsumsi sehari-hari. Meski pemerintah mengecualikan beberapa barang kebutuhan pokok dari PPN, kenyataannya efek berantai dari kenaikan harga jasa dan barang lain tetap akan dirasakan.
2. Dampak terhadap Dunia Usaha Dunia usaha kemungkinan besar akan menghadapi dilema: apakah menanggung beban tambahan PPN atau mengalihkan sepenuhnya kepada konsumen. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kenaikan PPN dapat menjadi tantangan tambahan karena daya saing harga semakin ketat. Namun bagi perusahaan besar, kenaikan ini bisa diatasi dengan efisiensi produksi.
3. Dampak terhadap Penerimaan Negara Dari sisi fiskal, kenaikan PPN jelas akan memperkuat kas negara. Indonesia masih menghadapi tantangan rasio pajak yang relatif rendah dibanding negara lain di kawasan ASEAN. Dengan tambahan penerimaan dari PPN, ruang fiskal untuk belanja negara bisa lebih luas. Pertanyaannya: apakah alokasi anggaran benar-benar akan efektif dan transparan untuk program yang menyentuh kebutuhan rakyat banyak?

Kebijakan fiskal selalu melibatkan dilema antara stabilitas anggaran dan kesejahteraan rakyat. PPN yang bersifat regresif berpotensi menambah kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan program kompensasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan penerimaan dari PPN tidak hanya menambal defisit, tetapi juga dialokasikan untuk:

- Subsidi tepat sasaran, khususnya pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- Penguatan UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
- Transparansi belanja publik, agar rakyat percaya bahwa pajak yang dibayar kembali dalam bentuk layanan yang adil dan merata.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 adalah kebijakan yang secara fiskal dapat dimaklumi, namun secara sosial berpotensi menimbulkan gejolak. Pemerintah harus berhati-hati agar tidak sekadar menambah penerimaan negara, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan

daya beli masyarakat. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai, kebijakan ini bisa berujung pada paradoks: negara lebih kaya, rakyat lebih menderita.

Barang yang dikenakan PPN 12% (efektif 12%) — Barang Mewah

Mulai 1 Februari 2025, penyerahan ke konsumen untuk kelompok ini dihitung $12\% \times$ harga jual penuh (sebelumnya, 1–31 Januari 2025 ada masa transisi $12\% \times 11/12$ harga). Contoh yang dikategorikan mewah dan di luar pengecualian lain:

- Kendaraan bermotor tertentu (mobil penumpang, dsb.) — juga bisa kena PPnBM sesuai kelompoknya.
- Hunian mewah (rumah/apartemen mewah).
- Pesawat/helikopter non-keperluan negara, kapal pesiar/yacht, senjata api & amunisi non-keperluan negara.

Barang yang dikenakan PPN (tarif hukum 12% tapi efektif $\approx 11\%$) — Barang Non-Mewah

Untuk hampir semua Barang Kena Pajak (BKP) non-mewah, per 2025 pemerintah menetapkan DPP “nilai lain” = $11/12 \times$ harga/nilai impor/penggantian, sehingga PPN terutang = $12\% \times (11/12 \times \text{DPP biasa}) \approx 11\%$. Ini berlaku seterusnya (bukan sekadar Januari).

Contoh kategori:

- Elektronik & perangkat rumah tangga (HP, TV, kulkas, AC, rice cooker, dsb.).
- Pakaian, alas kaki, kosmetik/perawatan pribadi.
- Perabot/furnitur & peralatan rumah.
- Bahan bangunan (semen, baja, cat, keramik, dsb.).
- Obat & produk farmasi umum (di luar fasilitas khusus).
- Makanan/minuman olahan & air minum kemasan (bukan komoditas pokok dalam daftar pengecualian).
- Impor BKP non-mewah dan BKP tidak berwujud (mis. lisensi perangkat lunak).



QRIS: Bikin Transaksi Praktis, Bikin Rupiah Lebih Kuat?

Oleh : Guspahri Ardiansyah Hasibuan, S.Kom.



Dulu, kalau mau bayar pakai QR code di Indonesia agak ribet. Setiap bank atau dompet digital punya QR masing-masing. Akibatnya pembeli harus punya aplikasi tertentu dan pedagang kecil repot karena harus pajang banyak QR, serta biaya transaksi sebagian lari ke luar negeri, karena banyak aplikasi pembayaran punya investor asing. Misalnya, kalau kita beli kopi Rp 25.000 lewat dompet digital tertentu, pedagang bisa kena potongan Rp500. Dari Rp500 itu, ada bagian yang jadi keuntungan investor asing, entah dari Singapura, Tiongkok, atau bahkan Amerika Serikat. Jadi tanpa sadar, rupiah kita “bocor” ke luar negeri setiap kali transaksi.

Sejak Bank Indonesia meluncurkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada 2019, semua kode QR disatukan. Sekarang, satu QR bisa dipakai semua aplikasi bank maupun dompet digital.

Keuntungannya antara lain lebih mudah bagi konsumen dan pedagang, lebih murah biaya transaksi, karena diatur Bank Indonesia, lebih aman karena sistem pembayaran jadi standar nasional.

Dengan begini, uang yang berputar di Indonesia lebih banyak tinggal di dalam negeri, tidak banyak mengalir ke investor asing. Negara Asing yang Merasa Dirugikan Beberapa negara tentu agak “gigit jari”, seperti Singapura, karena banyak modal ventura mereka dulu menikmati fee dari startup pembayaran

Indonesia. Tiongkok, lewat *Alipay* dan *WeChat Pay*, yang tadinya mau ekspansi besar ke Asia Tenggara.

Amerika Serikat, lewat investor *Silicon Valley* yang punya saham di dompet digital lokal. Tapi mereka juga melihat peluang. Sekarang ada QRIS lintas negara (*cross-border QRIS*).

Wisatawan asing dari Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Jepang bisa bayar langsung dengan aplikasi mereka, dan pedagang di Indonesia tetap terima uang dalam rupiah.

Pertanyaannya apakah QRIS bikin rupiah lebih kuat terhadap dolar? Jawabannya secara tidak langsung adalah iya. Kebocoran kecil-kecil ke luar negeri bisa ditekan. Transaksi makin banyak pakai rupiah, bukan dolar. Cross-border QRIS bikin wisatawan asing bayar langsung pakai rupiah, tanpa lewat dolar dulu. Contoh gampang: turis Thailand ke Bali bayar hotel Rp1 juta lewat aplikasi pembayaran Thailand. Dengan QRIS, uang masuk ke rekening hotel langsung dalam rupiah. Kalau tanpa QRIS, transaksi biasanya lewat dolar dulu baru ditukar ke rupiah. Artinya, permintaan rupiah naik, sementara ketergantungan pada dolar berkurang.

QRIS bukan hanya bikin transaksi jadi praktis dan murah. Lebih jauh, ia juga bagian dari strategi Indonesia menjaga kedaulatan sistem pembayaran. Mungkin efeknya tidak langsung terasa di kurs rupiah hari ini, tapi dalam jangka panjang, QRIS bisa jadi senjata penting untuk bikin rupiah lebih kuat di hadapan dolar.



8 Asta Cita Presiden RI

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Tahukah Anda bahwa arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan dirangkum dalam sebuah program bernama Asta Cita? Kata Asta berarti delapan, sementara Cita berarti tujuan atau cita-cita. Program ini menjadi fondasi visi Presiden RI dalam membangun Indonesia menuju bangsa yang lebih kuat, sejahtera, dan berdaya saing di tengah dinamika global.

Delapan Cita Menuju Indonesia Maju

Program Asta Cita terdiri dari delapan prioritas besar:

1. Pembangunan manusia Indonesia unggul – menekankan pendidikan berkualitas, kesehatan, serta peningkatan keterampilan untuk menghadapi era digital dan persaingan global.
2. Transformasi ekonomi berkelanjutan – memperkuat hilirisasi industri, energi baru terbarukan, dan ketahanan pangan agar ekonomi nasional lebih tangguh.
3. Reformasi hukum dan birokrasi – menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, serta penegakan hukum yang adil dan berwibawa.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur – melanjutkan pembangunan jalan tol, transportasi massal, serta konektivitas antardaerah, dari kota besar hingga pelosok.
5. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan menjaga keragaman budaya

bangsa sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim.

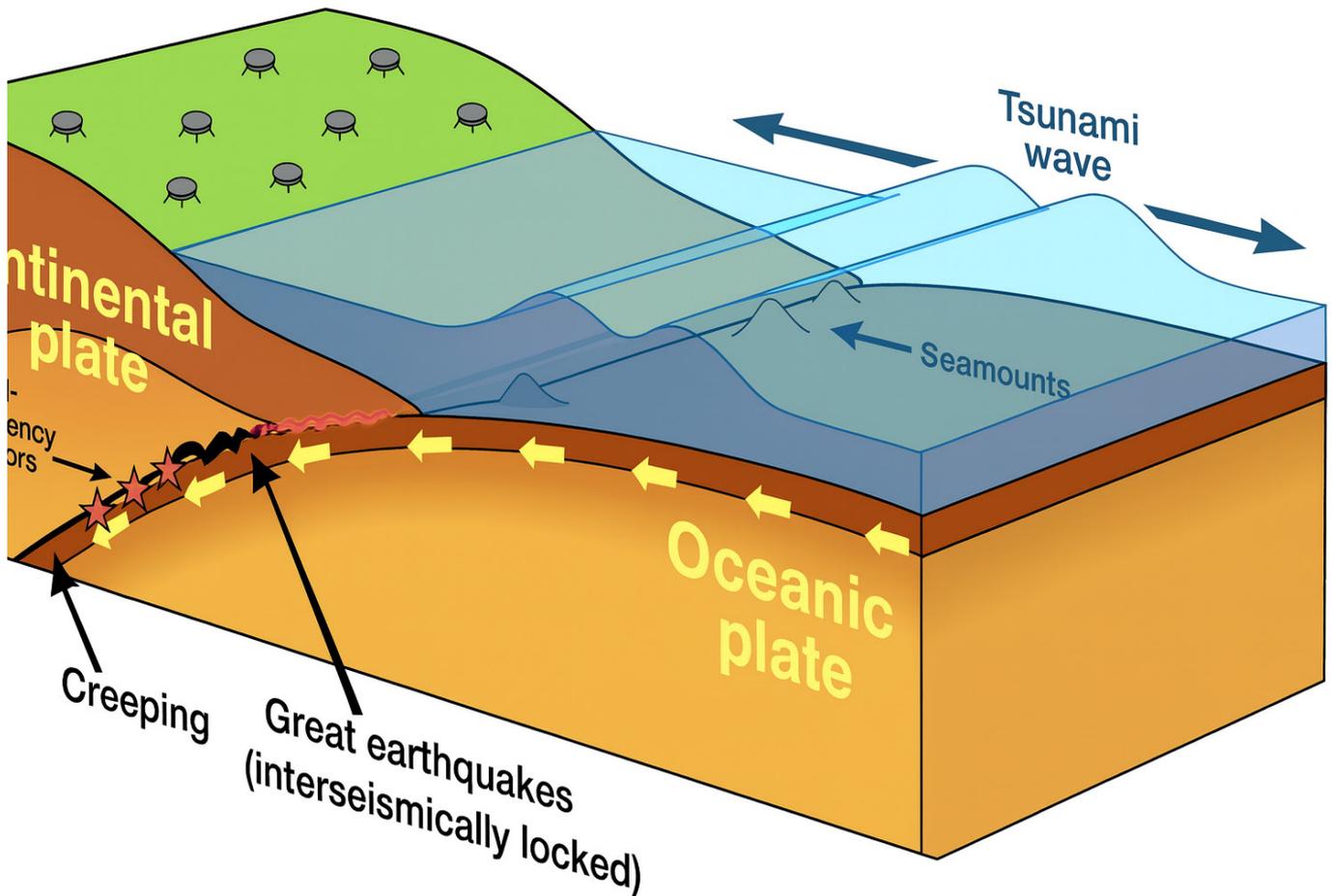
6. Digitalisasi dan inovasi mendorong ekosistem ekonomi digital, riset, serta penguasaan teknologi strategis.
7. Ketahanan dan kedaulatan nasional memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter.
8. Kepemimpinan Indonesia di kancah global memperkuat diplomasi internasional dan kontribusi Indonesia dalam isu-isu global seperti perdamaian, energi, dan pangan.

Mengapa Penting?

Asta Cita bukan hanya slogan politik, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) pembangunan. Program ini dirancang agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain penting di tingkat global. Misalnya, lewat hilirisasi mineral dan energi, Indonesia ingin naik kelas dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, aspek pertahanan dan kedaulatan nasional juga masuk prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kekuatan pertahanan negara. Dengan kata lain, Indonesia dituntut kuat secara ekonomi, sekaligus aman dan berdaulat di hadapan dunia.

TAHUKAH ANDA



Sumber : Google Image

Ancaman di Bawah Laut: Mengungkap Bahaya Megathrust

Oleh : Prasetyo, A.Md

Bagi sebagian orang, kata ini “megathrust” mungkin asing. Padahal, megathrust adalah salah satu ancaman alam terbesar yang berpotensi memicu gempa bumi dan tsunami dahsyat, khususnya di Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*). Memahami fenomena ini sangat penting untuk keselamatan kita.

Sederhana, megathrust adalah patahan raksasa yang terbentuk di dasar laut, tepat di area pertemuan dua lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah potongan besar kerak bumi yang terus bergerak. Di area ini, satu lempeng (biasanya lempeng samudra yang lebih berat menghujam ke bawah lempeng lainnya). Proses pergerakan ini tidak selalu mulus. Ser-

ingkali, lempeng yang menghujam “terkunci” oleh lempeng di atasnya akibat gesekan yang sangat kuat. Akibatnya, energi terus menumpuk di zona tersebut. Ketika batuan tidak lagi mampu menahan tekanan, ia akan patah dan melepaskan seluruh energi yang tersimpan secara tiba-tiba. Pelepasan energi inilah yang menyebabkan gempa bumi dengan kekuatan sangat besar, seringkali di atas magnitudo 8.0, yang berpotensi memicu tsunami.

Zona Megathrust di Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar (Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik), Indonesia memiliki be-

berapa zona megathrust aktif. Beberapa di antaranya yang paling disorot oleh BMKG adalah:

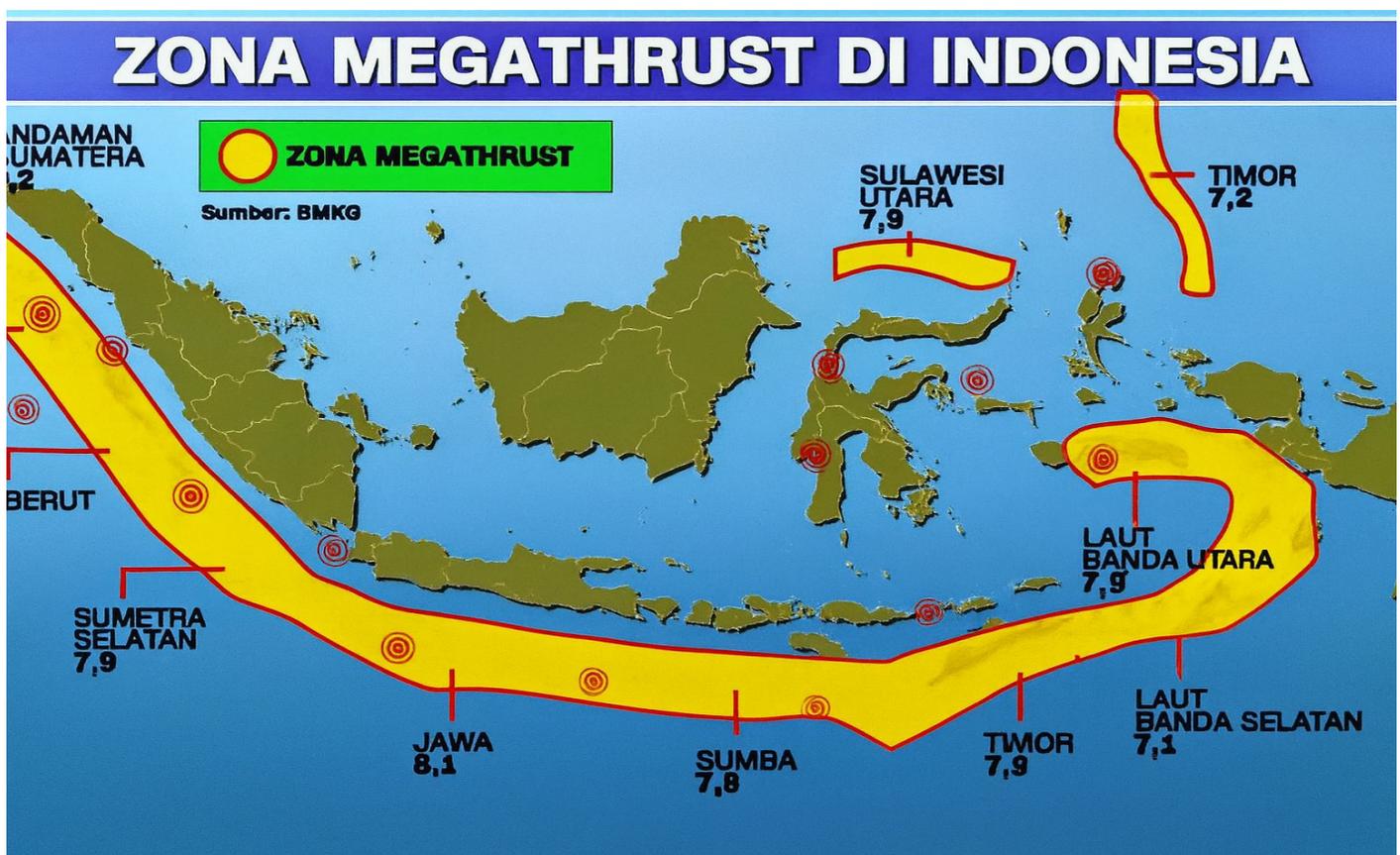
- Megathrust Sunda: Membentang dari perairan barat Sumatera, selatan Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara. Zona ini menjadi perhatian utama karena berpotensi memicu gempa besar yang dapat berdampak pada kawasan padat penduduk.
- Megathrust Laut Banda: Terletak di bagian timur Indonesia.
- Megathrust Sulawesi Utara: Berada di utara Sulawesi dan berpotensi menghasilkan gempa dan tsunami yang dapat berdampak pada kawasan sekitarnya.

akibat megathrust, seperti gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 yang dipicu oleh patahan megathrust di lepas pantai Sumatera. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan.

Untuk itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan.

Langkah Sederhana untuk Siap Siaga:

- Pahami Jalur Evakuasi. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal atau kerja Anda.
- Siapkan Tas Darurat. Siapkan tas berisi obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan makanan siap saji.



Sumber: 13 Sumber Gempa Megathrust dokumen BMKG

Pemerintah melalui lembaga seperti BNPB dan BMKG terus melakukan riset dan sosialisasi mengenai potensi ancaman ini. Informasi dari situs resmi BMKG (www.bmkg.go.id) dan BNPB (www.bnpb.go.id) menjadi sumber data utama yang kredibel untuk mengetahui zona rawan gempa, sistem peringatan dini, dan langkah-langkah mitigasi.

Mengapa Kita Perlu Waspada?

Sejarah mencatat peristiwa gempa besar

- Ikuti Simulasi. Berpartisipasi dalam latihan atau simulasi bencana yang diadakan oleh pemerintah setempat.

Memahami megathrust bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat bertindak lebih bijak dan terstruktur dalam menghadapi potensi bencana alam.

GALERY





DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

